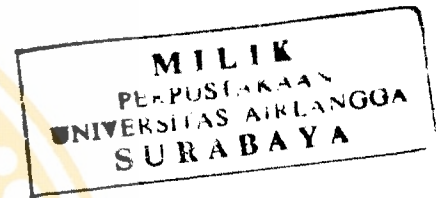


# SKRIPSI

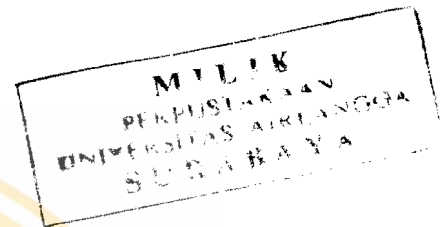
*HANANTO WIDODO*

## PEMBENTUKAN UU NO. 9 TAHUN 1998 DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000

**PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998  
DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI RAKYAT**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Romlah".

**Hj. Romlah Sartone, S.H., MS.**  
**NIP. 130 359 289**

**Penyusun,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hananto Widodo".

**Hananto Widodo**  
**NIM. 039413898**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 4 Februari 2000**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**1. Ketua : Udin, S.H.**

**2. Anggota : - Hj. Romlah Sartono, S.H., M.S.**

**- J. Hendy Tedjonagoro, S.H.**

**- Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.**

**- Sukardi, S.H. M.H.**

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. KESIMPULAN**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik oleh penulis dalam bab terakhir ini, yaitu :

*Pertama*, bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 belum memberikan perlindungan hukum sepenuhnya terhadap para peserta atau pelaku. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa pasal yang mempunyai tendensi ke arah “pasal karet”, disebabkan adanya pasal dalam undang-undang tersebut yang tidak dirumuskan secara jelas, sehingga polisi sebagai institusi yang berwenang menangani masalah ini dapat menafsirkan pasal yang tidak jelas secara sepihak (pasal 9 ayat (3) dan pasal 13 ayat (1) huruf a).

Perumusan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan di samping berkenaan dengan asas kepastian hukum juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi rakyat, karena jika rumusan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas akan terjadi penafsiran yang begitu luas yang akan dapat ditafsirkan oleh penguasa sesuai kepentingannya.

*Kedua*, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sendiri belum memberikan keadilan substantif sepenuhnya pada pihak peserta atau pelaku penyampaian pendapat di muka umum sebagai cerminan asas keadilan. Hal ini dapat kita lihat pada masalah ancaman pidana yang dikenakan pada



penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dikenai ancaman pidana pokok ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok, sedangkan yang menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dikenai ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun, dari sini dapat kita lihat bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 belum memberikan keadilan substantif sepenuhnya terhadap para pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

*Ketiga*, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 belum memberikan keadilan prosedural sepenuhnya pada pihak peserta atau pelaku penyampaian pendapat di muka umum sebagai cerminan dari asas perlakuan yang sama dalam hukum. Keadilan prosedural berkenaan dengan perlindungan hukum represif, yakni berupa upaya hukum dari pihak peserta atau pelaku penyampaian pendapat di muka umum jika terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak aparat kepolisian. Dan tentang upaya hukum tersebut dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak diatur.

## 2. SARAN

Perlindungan hukum bagi rakyat khususnya dalam menyalurkan haknya adalah merupakan keharusan dalam negara hukum. Hal ini dianut dalam sistem Undang-undang Dasar kita yang di mana negara kita adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam negara yang berdasar atas hukum,

perlindungan hukum terhadap hak asasinya termasuk salah satu unsur dari negara hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat dalam menyalurkan hak berpartisipasi, dalam negara hukum dituangkan dalam produk hukum yang dinamakan undang-undang, sebab undang-undang merupakan produk hukum yang membatasi hak, di mana pembatasan hak itu sendiri tidak boleh menghilangkan esensi dari kebebasan dari rakyat untuk berpartisipasi. Hakekat dari pembatasan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum dari pihak lain, agar para pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum menghargai hak-hak orang lain.

Dalam pembentukan hukum tentang kemerdekaan berpartisipasi dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, maka harus mengacu pada asas-asas yang telah dirumuskan dalam undang-undang tersebut, dan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang patut.